

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Asikin, Z. (2013). *HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA*. Penerbit Pustaka Reka Cipta.

Djoko Imbawani Atmadjaja. (2012). *Hukum Dagang Indonesia: Sejarah, Pengertian dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang*. Setara Press.

Hanitijo Soemitro, R. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia.

Hartono, S. (1991). *KAPITA SELEKTA PERBANDINGAN HUKUM*. PT Citra Aditya Bakti.

Herlambang, T., Nurwidiatmo, & Kadira, T. (2017). Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi). *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 3(1), 23–32.

Herlin, B. (2014). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. PT Citra Aditya Bakti.

J, S. (2012). *Wanprestasi*. PT Citra Aditya Bakti.

Kusumaatmadja, M. (2006). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. PT Alumni.

Mahsun. (2008). Metode Penelitian Bahasa. In *Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya*.

Maros, H., & Juniar, S. (2016). *濟無 No Title No Title No Title*. 2(11), 1–23.

- Mertokusumo, S. (1999). *MENGENAL HUKUM SUATU PENGANTAR*. liberty.
- Mertokusumo, S. (2004). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. liberty.
- Moonti, U. (2016). *Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*. interperna.
- Retnaningsih, S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(1), 1–16.
- Rifani, R. A., Fauziah, F., & Fahrudin, M. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i2.57>
- Ruslina, E. (2013). *DASAR PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM PENYIMPANGAN MANDAT KOSTITUSI UUD NEGARA 1945* (S. Bakhri (ed.)). Perpustakaan Nasional.
- Santoso, A. (2015). *Hukum, Moral Dan Keadilan*. kencana.
- Sastrawidjaya, M. S. (2019). *Hukum Kepailitan Anailisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Kepailitan*. Penerbit Buku-Buku Ilmu Hukum.
- Sattar. (2017). *BUKU AJAR EKONOMI KOPERASI*. Deepublish.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Prenada Media Group.

Subekti, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Balai Pustaka.

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.

Wiyono, E. H. (2007). *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. akar media.

Yani, A. (2004). *KEPAILITAN*. PT Raja Grafindo.

B. Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Sumber Lain

Annisa, F., & Hadiati, M. (2021). Analisis Pengesahan Perdamaian (Homologasi) terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas Isi Perjanjian Perdamaian yang Mengalami Perubahan (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 718K/Pdt. Sus-Pailit/2019). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 73-97.

Budiyono, T. (2021). Budiyono, T. (2021). penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu) dalam masa pandemi covid-19: antara solusi dan jebakan. . *Masalah-Masalah Hukum*, 232-243.

Herlambang, T., Nurwidiatmo, & Kadira, T. (2017). Kepastian Hukum Pelaksanaan

Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi). *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 3(1), 23–32.

Indarto, A. F. (2022). ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA (Studi Kasus Perkara Nomor 14/Pdt. Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo. Nomor 10/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN. Niaga. Smg Jo. Nomor 1292 K/Pdt. Sus-Pailit/2020). . *Diponegoro Law Journal*.

Indarto, A. F., Mahmudah, S., & Saptono, H. (2022). ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA (Studi Kasus Perkara Nomor 14/Pdt. Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo. Nomor 10/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN. Niaga. Smg Jo. Nomor 1292 K/Pdt. Sus-Pailit/2020). *Diponegoro Law Journal*, 11(2).

Mantili, R. &. (2023). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 11.

MARIA, M. J. (2023). ANALISIS WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) ANTARA PT LAUTAN WARNA SARI DAN PT KERTAS LECES (PERSERO)(Studi Putusan 05/PKPU/2014/PN. Niaga. Sby) . (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).

PAMBUDI, L. A. (2021). Analisis Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Pengembalian Dana Anggota Koperasi Simpan Pinjam (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).

- Purba, M., & Sunarmi, B. N. (2019). Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Pdt. Sus-PKPU/2014). *Usu Law Journal*, 7(2), 138-148.
- Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*.
- Retnaningsih, S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(1), 1–16.
- Rifani, R. A., Fauziah, F., & Fahrudin, M. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i2.57>
- Rusdiannor, A. (2022). REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN DEBITUR ATAS HAK PEMAILITAN KREDITUR SEPARATIS DALAM HUKUM KEPAILITAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- SANJAYA, U. H. (2012). EWENANGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK UNTUK MENGEKSEKUSI HARTA DEBITOR SETELAH TERJADINYA PERDAMAIAN DALAM KERANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) . Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia.

- Shubhan, M. H. (2022). Karakteristik Hukum Kepailitan Indonesia Dan Perkembangannya Sebagai Instrumen Hukum Recovery Pembayaran Utang Debitor.
- Silalahi, U. &. (2021). Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi. *Undang: Jurnal Hukum*, 371-401.
- Sjahdeini, S. R. (2016). Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Prenada Media Group.
- Syahrul, A. F. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP ADANYA UTANG BARU YANG DIMILIKI DEBITOR YANG TIMBUL SETELAH DILAKUKAN HOMOLOGASI OLEH PENGADILAN NIAGA PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. " Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3), 2.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.